

Terbit : 04 November 2023

Peranan Bagian Keuangan Dalam Pengelolaan Anggaran Untuk Program Kerja di Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu

Juwita Putri Wulandari¹, Siti Aisyah²

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

juwita Putriwd@gmail.com¹, siti.aisyah@uinsu.ac.id²

ABSTRAK

Tanggung jawab Sekretariat DPRD antara lain mengawasi pengelolaan kesekretariatan dan keuangan, membantu pelaksanaan kewajiban DPRD, serta menyediakan dan mengatur staf khusus yang diperlukan DPRD dalam rangka melaksanakan mandatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi bagian keuangan dalam pengelolaan anggaran program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah catatan dan wawancara. Dokumentasi, percakapan tatap muka, dan pedoman wawancara berfungsi sebagai instrumen pengumpulan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bagian keuangan yang membidangi administrasi keuangan membuat rencana setelah berkonsultasi dengan anggota DPRD. Hal ini memungkinkan rencana kerja anggota DPRD diubah sesuai dengan keterbatasan anggaran yang ada, sehingga memudahkan anggota direksi dalam melaksanakan inisiatifnya.

Kata kunci : Bagian Keuangan, Pengelolaan Anggaran, Program Kerja

PENDAHULUAN

Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai peranan penting dalam membina kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan umum berdasarkan aspirasi untuk kepentingan umum. Sekretaris DPRD dibentuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan DPRD. Hal ini tertera pada PP no. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan sebagai berikut: "Sekretariat DPRD adalah lembaga daerah yang mewakili sebagian urusan pemerintahan DPRD, meliputi pengelolaan Sekretariat DPRD, pengelolaan keuangan DPRD, dan penunjang penyelenggaraan DPRD. tugas dan fungsi DPRD, serta memberikan pelayanan pengiriman khusus sebagaimana dipersyaratkan oleh DPRD. Dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD sangat penting dalam menjalankan tanggung jawab dalam pencapaian tugas dan fungsi DPRD. Guna meningkatkan efektivitas kinerja Sekretariat perlu dilakukan upaya yang maksimal, DPRD mendukung pelaksanaan seluruh tanggung jawabnya.

Untuk mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, setiap perusahaan atau organisasi bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Salah satu alat kunci dalam proses ini adalah anggaran. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk memudahkan

pelaksanaan inisiatif dan kegiatan sejalan dengan tujuan organisasi dan akan digunakan sebagai standar evaluasi efektivitas organisasi. Pembuatan anggaran merupakan langkah awal yang penting karena harus memperhatikan kinerja organisasi agar rencana yang telah disusun dapat terlaksana.(Rustanti & Sudharma, 2022)

Selain mendukung pelaksanaan tanggung jawab DPRD, Sekretariat DPRD juga memberikan layanan pengelolaan administrasi dan keuangan. Selain itu juga mengatur dan menyediakan kebutuhan personel khusus DPRD sesuai dengan kemampuan kekuatan keuangan daerah. Tugas Sekretariat DPRD antara lain menyelenggarakan rapat, mengkoordinasikan perekrutan staf khusus yang diperlukan DPRD, dan mengawasi pelaksanaan sekretariat DPRD dan pengelolaan keuangan.(Akuntansi, 2022). Salah satu komponen kekuasaan pemerintahan adalah negara. Cakupan tugas pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, tanggung jawab masyarakat, dan pengawasan. Pelaporan keuangan dari Sekretariat DPRD merupakan salah satu komponen pengelolaan keuangan daerah yang sangat menentukan proses keuangan daerah secara keseluruhan. Dalam pelaksanaan monetisasi pemerintahan daerah, keuangan daerah mengacu pada hak dan kewajiban daerah, termasuk segala bentuk kekayaan yang terkait dengan hak dan kewajiban tersebut.(Citra Permatasari, 2022)

Nilai akuntabilitas dan transparansi harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Mardiasmo (2006: 3) mendefinisikan akuntabilitas sebagai tugas untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditentukan melalui tindakan akuntabilitas secara berkala. Dengan kata lain, akuntabilitas dan transparansi masyarakat merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Anggaran adalah laporan keuangan yang memproyeksikan kinerja organisasi selama periode waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran adalah alat yang digunakan oleh organisasi sektor publik untuk mengelola dana publik dan melaksanakan proyek yang dibiayai oleh dana publik. Penganggaran, di sisi lain, adalah tindakan menciptakan anggaran.

Di Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu, pengelolaan keuangan juga menjadi hal yang krusial agar jumlah yang dianggarkan dapat menutupi seluruh kebutuhan program dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai anggaran. Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu akan menyiapkan anggaran yang telah diidentifikasi, yang tidak terlepas dari biaya terkait program. Biaya dukungan program harus ditanggung oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu untuk semua program. Untuk menciptakan anggaran yang bermanfaat berdasarkan kebutuhan tersebut, maka perlu disusun anggaran dan sistem alokasi biaya yang baik.(Rorong et al., 2017)

KAJIAN TEORI

Kata “anggaran” (Inggris) berasal dari kata Perancis “bouteillette,” yang berarti “tas kecil.” Indra Bastian yang bekerja pada Government Accountability Board (GASB) yang dahulu bernama National Government Accounting Board (NCGA) mengartikan anggaran sebagai rencana operasional keuangan yang mencakup sumber pendapatan, rencana belanja, dan perkiraan pengeluaran, yang semuanya yang disponsori dalam jangka waktu tertentu.

Proses anggaran yang ditampilkan secara publik seringkali mempunyai dampak yang signifikan. Anggaran adalah rencana pengeluaran pemerintah untuk jangka waktu tertentu, biasanya tahun depan, yang mencakup jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan untuk mendanai inisiatif pemerintah daerah serta jumlah yang akan dikumpulkan oleh negara, asalkan negara tersebut mampu membayar biaya tersebut. biaya dalam jangka waktu tersebut. Tiga tujuan utama penganggaran adalah menstabilkan anggaran, mengalokasikan sumber

daya berdasarkan prioritas, dan menggunakan anggaran secara efektif dan efisien. Tujuan-tujuan ini saling berhubungan. Anggaran merupakan alat pengelolaan perekonomian yang mendukung tujuan pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas perekonomian. Alat lain untuk mengatur dan mengelola operasi pemerintah adalah anggaran.(Perawati, 2023)

Anggaran berfungsi sebagai peta jalan bagi seluruh tindakan pemerintah, termasuk transfer, hibah, pendapatan, dan pengeluaran yang semuanya dinyatakan dalam rupee dan disusun secara sistematis, dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan berdasarkan klasifikasi tertentu. Anggaran adalah dokumen formal yang dibuat berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh legislatif dan eksekutif mengenai pengeluaran dan pendapatan. Tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan keuangan dan pengeluaran negara, menjadi landasan bagi inisiatif untuk meningkatkan pendapatan, dan mendanai anggaran sementara.(Nurchahyo, D., & Mathori, 2018)

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang terbaik hanya dapat terjadi apabila terdapat sumber pendapatan yang memadai bagi daerah tersebut selain dari hasil kerja pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 66 Ayat 1, keuangan daerah dikelola secara bertanggung jawab, dengan memperhatikan keadilan, harta benda, dan kepentingan umum, dengan tetap dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, gagasan optimalisasi sumber daya dan sila tata kelola yang baik digunakan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan berorientasi pada hasil. Melalui Organisasi Daerah (OPD), seluruh sumber keuangan yang terkait dengan setiap permasalahan pemerintahan yang ditujukan kepada daerah sebagai bagian dari Pembiayaan Daerah akan disalurkan. Misalnya, peran Bendahara dalam pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Labuhanbatu akan diperkuat.

METODE PENELITIAN

Metode pilihan penulis untuk penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu menjadi tempat penelitian ini dilakukan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti berupaya mengkaji bagaimana bagian keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Labuhanbatu mengelola anggaran program kerja. Selain data penelitian utama, data primer untuk penelitian ini berasal dari wawancara satu lawan satu dengan informan yang telah diidentifikasi sebelumnya, termasuk wawancara lanjutan dengan informan dari bagian keuangan perkantoran. Buku, jurnal, dan tinjauan literatur dijadikan sebagai sumber data sekunder untuk penelitian ini. Data pendukung tambahan antara lain informasi mengenai tanggung jawab dan fungsi Bagian Perencanaan Keuangan serta struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab utama Sekretariat Dewan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah mengawasi operasional sekretariat, mengelola keuangan, membantu melaksanakan amanah DPRD, dan menata tenaga profesional sesuai kebutuhan DPRD dengan memanfaatkan sumber keuangan daerah.(Efendi & Dewi, 2019)

Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2019 Nomor 12. Apabila tersedia sumber penerimaan daerah yang cukup untuk menunjang operasional pemerintahan, maka pelaksanaan fungsi pemerintahan akan dapat dilaksanakan seefisien mungkin. Sekretariat Daerah yang dijalankan oleh organisasi daerah seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu menerima seluruh sumber daya

keuangan yang terkait dengan setiap permasalahan yang ditugaskan pemerintah kepada daerah. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah semuanya termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah. Nilai akuntabilitas dan transparansi harus diperhatikan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, akuntabilitas horizontal yang transparan akuntabilitas kepada masyarakat harus menjadi ciri pengelolaan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi anggaran DPRD dan DPRD mengatur bahwa penyampaian dan pembahasan usulan anggaran DPRD mempunyai bobot yang sama dengan usulan dan anggaran lainnya. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban akhir tahun direktur pemerintah daerah mencakup laporan pertanggungjawaban keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD. Kantor DPRD membidangi pengelolaan keuangan DPRD, dan kewajiban DPRD diatur dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penggunaan anggaran (keuangan) tentu saja mengarah pada terciptanya sistem akuntabilitas keuangan DPRD.(Ismail & Saggaf, 2020)

Tanggung jawab utama kantor DPRD adalah membantu pelaksanaan operasional Dewan. Karena anggota dewan tidak dapat menjalankan tugasnya tanpa dukungan administratif dan keuangan dari pemerintah daerah, maka tugas dan fungsi DPRD menjadi sangat penting. Perlu disebutkan lebih lanjut bahwa kantor DPRD antara lain mengurus kantor, mengawasi pengelolaan keuangan DPRD, mempermudah terselenggaranya rapat-rapat DPRD, menyediakan dan mengatur personel khusus yang diperlukan DPRD, antara lain.

Mendukung kegiatan anggota DPRD dan pelaksanaan fungsi DPRD, seperti penganggaran, penyusunan peraturan, dan pengawasan daerah yang dilakukan dengan menjamin pengelolaan di daerah merupakan tugas penting yang dilakukan oleh organisasi Sekretariat DPRD. Formulir pendaftaran pengurus, jadwal kegiatan DPRD, surat menyurat, dan dokumen penting yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD, penyiapan dokumen dan data serta dokumen yang berkaitan dengan pembahasan rancangan undang-undang, serta risalah rapat dan dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut hingga penganggaran dan pengendalian DPRD semuanya dimasukkan.

Selain menyediakan daftar kehadiran anggota dewan dan pengurusan surat kepengurusan yang diterima dan dikirimkan dari kantor DPRD, dukungan administratif yang diberikan Sekretariat DPRD juga mencakup pembuatan daftar tugas yang diharapkan diselesaikan oleh anggota dewan baik di dalam maupun di luar kantor. dan di luar kantor. Ketika anggota DPRD aktif, dukungan administratif tambahan diberikan dengan membantu anggota tertentu yang ingin berkeliling ke berbagai wilayah kerjanya. Peningkatan pengelolaan keuangan diperlukan untuk mendukung fungsi DPRD. Bagian Keuangan yang membidangi pengelolaan keuangan membuat rencana setelah berkonsultasi dengan anggota DPRD sehingga rencana operasional dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi keterbatasan anggaran. Anggota Sekretariat DPRD juga membayar seluruh tagihan akibat penggunaan produk dan jasa oleh anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.(Malau et al., 2022)

Anggaran merupakan alat pelaksanaan akuntabilitas, pengelolaan, dan tata kelola perekonomian karena peranannya dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan administratif akan dilakukan berdasarkan perkiraan APBD yang komprehensif. Bagaimana alat penganggaran dan pengelolaan ekonomi digunakan untuk mencapai tujuan seperti pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas. Proses mencari tahu apa yang ingin Anda capai dan berapa banyak uang yang Anda perlukan untuk satu tahun anggaran disebut perencanaan anggaran. Tentu saja, pengelolaan anggaran melibatkan penganggaran. Untuk itu pengelolaan anggaran Kantor DPRD Kabupaten

Labuhanbatu perlu kehati-hatian ekstra untuk memastikan dana yang digunakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Berdasarkan temuan survei, program sponsorship, kegiatan material dan non-keuangan yang telah dijadwalkan sebelumnya, serta pedoman teknis dan aturan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD adalah hal-hal yang memungkinkan pengelolaan keuangan menjadi efisien. Menurut penulis, pengelolaan direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan semua persyaratan hukum yang relevan, dan semuanya berjalan dengan baik. Kepala Daerah yang membawahi Sekretaris DPRD dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan anggaran. “Nilai belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimum untuk setiap pos pengeluaran,” sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Pasal 122 Nomor 5.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh regulator keuangan, yang mencakup tindakan yang terkait dengan penyampaian dan penyediaan informasi keuangan, disebut sebagai informasi keuangan. Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan pencapaian bulan tersebut harus didokumentasikan dalam suatu dokumen yang disebut Surat Tanggung Jawab Keuangan (SPJ), yang harus dikirimkan kepada Badan Pengelola Aset pada tanggal sepuluh setiap bulan disertai dengan buku kas umum, daftar kwitansi, dan pembayaran pajak. Rencana anggaran pada setiap awal tahun anggaran menjadi landasan penatausahaan setiap anggaran oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Setelah ini, laporan keuangan terperinci dihasilkan tergantung pada pendapatan keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diawasi oleh pegawai Sekretariat DPRD Labuhanbatu (APBD). Oleh karena itu, laporan pengeluaran keuangan secara rinci dibuat dengan menggunakan data pendapatan dan pengeluaran keuangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para pemberi informasi pada saat wawancara, umumnya laporan keuangan disusun dengan sangat rinci berdasarkan pendapatan dan pengeluaran, dan terlebih dahulu dikaji oleh Sekretaris DPRD Labuhanbatu. Pelaporan diikuti dengan akuntabilitas. Tahap akuntabilitas merupakan tahap yang paling krusial dalam pemanfaatan anggaran karena pada tahap inilah seluruh program yang direncanakan dan tingkat keberhasilannya dapat diketahui. Dokumen tertulis yang disebut informasi keuangan dimaksudkan untuk memberikan laporan tentang seberapa baik operasi keuangan dilakukan selama periode waktu tertentu, yang mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan.(Alfian & P. Novi, 2023)

Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu menggunakan penganggaran, suatu bentuk pengelolaan anggaran yang menghubungkan sumber pendanaan operasional dengan proyeksi outcome dan output, termasuk seberapa baik output tersebut dicapai. Tujuan operasional setiap satuan kerja di bawah Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu menentukan pencapaian dan keluarannya. Program ini juga menjelaskan cara mencapai tujuan dan menyediakan sumber pendanaan untuk setiap tahap penyelesaian tujuan.

Instrumen kebijakan yang terdiri dari satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu untuk mencapai maksud dan tujuan serta mencapai alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu, dikenal dengan istilah kinerja berdasarkan program anggaran. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencapai kinerja tahunan. Dengan kata lain, anggaran berbasis kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Labuhanbatu mencakup integrasi rencana kerja tahunan yang terdiri dari rencana operasional, rencana strategis, dan anggaran tahunan.

Hasil survei membantu kita memahami bahwa departemen keuangan berperan penting dalam proses penganggaran pendanaan program kerja dan bagaimana bekerja sama dengan anggota DPRD untuk membantu mereka menyesuaikan rencana kerja sesuai dengan dana yang tersedia. Selain itu, para anggota Sekretariat DPRD melunasi tagihan-tagihan yang timbul akibat penggunaan perbekalan dan jasa oleh anggota DPRD untuk keperluan pekerjaan. Hal ini mencakup memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada, termasuk mengkoordinasikan penggunaan anggaran dan data nyata yang dikumpulkan di lapangan, dan menjaga ketaatan pada jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini memerlukan ketersediaan sumber daya manusia untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, serta pengendalian untuk menunjukkan arah yang tepat dalam pelaksanaan dan penyelesaian suatu kegiatan. Hal ini menunjukkan betapa keberadaan Departemen Keuangan mampu mengawasi dan memfasilitasi kelancaran operasional anggota DPRD.

SIMPULAN

Sekretariat Daerah yang dijalankan oleh organisasi daerah seperti Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu menerima seluruh sumber daya keuangan yang terkait dengan setiap permasalahan yang ditugaskan pemerintah kepada daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi anggaran DPRD dan DPRD mengatur bahwa penyampaian dan pembahasan usulan anggaran DPRD mempunyai bobot yang sama dengan usulan dan anggaran lainnya. Mendukung kegiatan anggota DPRD dan pelaksanaan fungsi DPRD, seperti penganggaran, penyusunan peraturan, dan pengawasan daerah yang dilakukan dengan menjamin pengelolaan di daerah merupakan tugas penting yang dilakukan oleh organisasi Sekretariat DPRD. Selain menyediakan daftar kehadiran anggota dewan dan pengurusan surat kepengurusan yang diterima dan dikirimkan dari kantor DPRD, dukungan administratif yang diberikan Sekretariat DPRD juga mencakup pembuatan daftar tugas yang diharapkan diselesaikan oleh anggota dewan baik di dalam maupun di luar kantor.

Berdasarkan temuan survei, program sponsorship, kegiatan material dan non-keuangan yang telah dijadwalkan sebelumnya, serta pedoman teknis dan aturan pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD adalah hal-hal yang memungkinkan pengelolaan keuangan menjadi efisien. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh regulator keuangan, yang mencakup tindakan yang terkait dengan penyampaian dan penyediaan informasi keuangan, disebut sebagai informasi keuangan..

Hal ini mencakup memastikan bahwa pengelolaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang ada, termasuk mengkoordinasikan penggunaan anggaran dan data nyata yang dikumpulkan di lapangan, dan menjaga ketaatan pada jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil survei membantu kita memahami bahwa departemen keuangan berperan penting dalam proses penganggaran pendanaan program kerja dan bagaimana bekerja sama dengan anggota DPRD untuk membantu mereka menyesuaikan rencana kerja sesuai dengan dana yang tersedia

REFERENSI

- Akuntansi, P. S. (2022). 1*, 2 1,2. 20(1), 105–123.
- Alfian, Y., & P. Novi. (2023). MES Management Journal. *Pengaruh ROA, CR, ATO, Dan DER Terhadap Return Saham Perusahaan Sub Sektor Aneka Industri Otomotif & Komponen Selama Pandemi Covid-19* Yudika, 2, 72–76.

- Citra Permatasari, N. H. (2022). As-Syirkah : Islamic Economics & Finacial Journal. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 1(1), 39–56. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i2.57>
- Efendi, R., & Dewi, L. K. (2019). Analisis Koordinasi Staf Sekretariat Dewan Dalam Menunjang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains*, 4(2), 113–125. <https://doi.org/10.24967/jshs.v4i2.505>
- Ismail, I., & Saggaf, S. (2020). Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 1(1). <http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/jangpa/article/view/79%0Ahttps://ojs.lppmuniprima.org/index.php/jangpa/article/download/79/69>
- Malau, H., Siregar, S. A., Marbun, J., & Agung, U. D. (2022). *Jurnal Retentum DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN KARO (STUDI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARO) Karo diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun*. 1–10.
- Nurchahyo, D., & Mathori, M. (2017). (2018). IE Ja W ng id an ya P Wi la w gi a at ha Ja W ng id an ya P Wi la w gi a at ha. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt Kereta Api Indonesia (Pt Kai) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kereta Api Kelas Eksekutif Taksaka*, 55, 1–95.
- Perawati, P. (2023). *Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Program Studi Akuntansi*.
- Rorong, R. O., Kalangi, L., & Affandi, D. (2017). Analisis Sistem Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus Pada Sekretariat Dprd Kota Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 2331–2341. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16625>
- Rustanti, N. M. D. K., & Sudharma, K. J. A. (2022). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2021 Pada Sekretariat DPRD Provinsi Bali. *Sosio E-Kons*, 14(3), 302. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i3.14182>